



NOMOR 44

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kelurahan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat kelurahan harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 58);
15. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 59);
16. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN
KELURAHAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengorganisasi, penyelenggara pelayanan dan pengendalian SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Bagian adalah Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
10. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
14. Perlombaan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah bersama masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
15. Profil Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan.
16. Tingkat perkembangan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan dan pengawasan secara teknis yang dilakukan oleh lembaga teknis terkait kepada instansi dan atau lembaga pada tingkatan yang lebih bawah.
19. Tim Pembina adalah instansi/Lembaga Teknis/ SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan tugas pembinaan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Perlombaan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Perlombaan kelurahan tingkat kota diselenggarakan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Peserta perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatannya.

- (2) Peserta perlombaan kelurahan tingkat kota adalah kelurahan yang menjadi juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan.
- (3) Peserta perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Camat kepada Walikota melalui SKPD.
- (4) Juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kota dilaporkan oleh Tim Penilai kepada Walikota selanjutnya oleh Walikota dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dilaksanakan antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret; dan
 - b. perlombaan kelurahan tingkat kota dilaksanakan antara bulan April sampai dengan bulan Mei.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, SKPD melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan lomba kelurahan tahun berkenaan.

BAB III PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.

- (2) Penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di kelurahan bersangkutan.
- (3) Indikator penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan masyarakat;
 - c. ekonomi masyarakat;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. pemerintahan kelurahan;
 - g. lembaga kemasyarakatan;
 - h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - j. upaya penanggulangan kemiskinan.
- (4) Lurah, Ketua LPM dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan menyampaikan ekspos yang merupakan bagian dari Indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Inisiatif dan kreatifitas kelurahan merupakan faktor pendukung penilaian.
- (6) Penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya dilaksanakan dengan membandingkan antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya sesuai tingkatan perlombaan kelurahan.

- (7) Mekanisme pelaksanaan penilaian perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat kota tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Indikator penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Juara Pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan kelurahan tingkat kecamatan.
- (2) Juara Pertama perlombaan kelurahan tingkat kota adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan kelurahan tingkat kota.

BAB IV

TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA

Pasal 10

- (1) Tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian perlombaan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan.

Pasal 11

- (1) Tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kota, anggotanya terdiri dari unsur SKPD, instansi vertikal dan Tim Penggerak PKK Kota.
- (2) Pembentukan Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukan juara perlombaan kelurahan tingkat kota.

Pasal 12

Untuk menghadapi penilaian tingkat Kota dan tingkat Provinsi, dilaksanakan pembinaan oleh Tim Pembina sesuai tingkatan dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah unsur kecamatan, unsur SKPD terkait tingkat kecamatan dan instansi vertikal tingkat kecamatan, serta Tim Penggerak PKK Kecamatan.

- (2) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka persiapan perlombaan kelurahan tingkat kota.

Pasal 14

- (1) Tim Pembina perlombaan kelurahan tingkat kota adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, instansi vertikal tingkat Kota dan Tim Penggerak PKK Kota.
- (2) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya untuk persiapan perlombaan kelurahan tingkat provinsi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk persiapan perlombaan kelurahan dilakukan secara terpadu oleh Tim Pembina terhadap :
 - a. Lurah beserta perangkatnya;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, RW dan RT); dan
 - c. Unsur kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dititikberatkan pada :
 - a. kesiapan ekspos oleh Lurah;
 - b. kesiapan ekspos oleh Ketua Tim Penggerak PKK;
 - c. kesiapan ekspos oleh Ketua LPM;

- d. sistematika ekspos sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini dan dapat menyesuaikan dengan petunjuk dari Tim Provinsi;
- e. pemahaman dan implementasi perangkat kelurahan terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- f. validasi data di Kelurahan, RW dan PKK; dan
- g. pemutakhiran data dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang ada di tingkat Kelurahan.

Pasal 16

Aspek pembinaan perlombaan kelurahan, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ekonomi masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pemerintahan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- i. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- j. upaya penanggulangan kemiskinan.

BAB V PENETAPAN JUARA

Pasal 17

- (1) Juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara perlombaan kelurahan tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Format berita acara hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Penghargaan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan diberikan oleh Camat.
- (2) Penghargaan juara perlombaan kelurahan tingkat kota diberikan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam dan atau bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagi juara pertama perlombaan kelurahan tingkat kota disamping diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bantuan stimulan untuk persiapan perlombaan kelurahan tingkat provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Walikota melalui SKPD dengan tembusan Bagian.
- (2) Pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kota dilaporkan oleh SKPD atas nama Walikota kepada Gubernur.
- (3) Hasil pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat kota agar dilaporkan sebagaimana format tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini dilaporkan dan didokumentasikan dalam bentuk Buku oleh SKPD.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan terhadap kelurahan yang telah menjadi juara dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat secara terpadu oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan yang berkaitan dengan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan kota dibebankan pada APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Desember 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN
 KELURAHAN DI KOTA CIREBON

PEDOMAN PENYUSUNAN EKSPOS

A. MATERI EKSPOS

Materi penyampaian ekspos pada perlombaan kelurahan di tingkat kecamatan dan tingkat kota adalah :

1. Di Tingkat Kecamatan
 - a. Ekspos lurah mengenai pemerintahan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
 - b. Ekspos TP PKK mengenai kebijakan program dan kegiatan PKK.
 - c. Ekspos LPM mengenai pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Di Tingkat Kota
 - a. Ekspos lurah mengenai pemerintahan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
 - b. Ekspos TP PKK mengenai kebijakan program dan kegiatan PKK.
 - c. Ekspos LPM mengenai pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. SISTEMATIKA BAHAN EKSPOS

Sistematika bahan ekspos pelaksanaan perlombaan kelurahan, adalah sebagai berikut :

- BAB. I Pendahuluan
- A. Gambaran Umum Kelurahan
 - B. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB. II Materi Ekspos (Penjabaran 9 aspek indikator penilaian yang membandingkan kinerja kelurahan 2 tahun sebelumnya)
- BAB. III Hasil yang dicapai (prestasi, inovasi, inisiatif dan kreativitas) kelurahan
- BAB. IV Kesimpulan dan Saran

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN
 KELURAHAN DI KOTA CIREBON

A. MEKANISME PENILAIAN LOMBA KELURAHAN

1. Di Tingkat Kecamatan.

Mekanisme penilaian pelaksanaan lomba kelurahan di tingkat kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kecamatan memberikan penilaian berdasarkan indikator penilaian sesuai format sebagaimana tertuang dalam lampiran I.
- b. Rekapitulasi hasil penilaian dari seluruh indikator dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penilaian Perlombaan Kelurahan dan ditandatangani oleh setiap anggota Tim serta dilaporkan kepada Camat.
- c. Format Berita acara sebagaimana dimaksud huruf b tertuang dalam lampiran V.
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi lampiran Keputusan Camat tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan.

2. Di Tingkat Kota.

Mekanisme penilaian pelaksanaan lomba kelurahan di tingkat kota, adalah sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Tim penilai perlombaan kelurahan tingkat kota memberikan penilaian berdasarkan indikator penilaian sesuai format sebagaimana tertuang dalam lampiran I.

- b. Rekapitulasi hasil penilaian dari seluruh indikator dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penilaian Perlombaan Kelurahan dan ditandatangani oleh setiap anggota Tim serta dilaporkan kepada Walikota.
- c. Format Berita acara sebagaimana dimaksud huruf b tertuang dalam lampiran V.
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi lampiran Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN
 KELURAHAN DI KOTA CIREBON.

INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN
 PERLOMBAAN KELURAHAN

I. Indikator Penilaian Perlombaan Kelurahan

A. Orbitasi

1. Orbitasi Wilayah

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1.	Kelurahan	1. > 6 Jam
		2. 5-6 jam
		3. 3-4 jam
		4. 1-2 jam
		5. < 1 jam
		6. Ada di Pusat Kecamatan
		7. Bantaran sungai
		8. Rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai)
		9. Bebas banjir

2. Jarak Geografis

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1.	Ke gunung km
2.	Ke laut km
3.	Ke sungai km
4.	Ke pinggiran Hutan km
5.	Ke pasar km
6.	Ke pelabuhan km
7.	Ke bandara km
8.	Ke terminal km
9.	Ke tempat hiburan km
10.	Ke tempat wisata km
11.	Ke kantor polisi/militer km
12.	Ke perbatasan kabupaten km
13.	Ke perbatasan propinsi km
14.	Ke perbatasan Negara km
15.	Ke stasiun km

3. Letak Geografis

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1.	Kawasan Hutan	Ada/tidak
2.	Kawasan Tambang	Ada/tidak
3.	Kawasan Pantai	Ada/tidak
4.	Kawasan Perbukitan/ pegunungan	Ada/tidak
5.	Kawasan Persawahan	Ada/tidak
6.	Kawasan Perkebunan	Ada/tidak
7.	Kawasan Peternakan	Ada/tidak
8.	Kawasan Industri kecil / rumah tangga	Ada/tidak
9.	Kawasan Saluran Listrik tegangan Tinggi (SUTET)	Ada/tidak
10.	Kawasan Rawan Banjir	Ada/tidak
11.	Kawasan Industri/ Pabrik	Ada/tidak
12.	Kawasan Perkantoran	Ada/tidak
13.	Kawasan Rawa	Ada/tidak
14.	Kawasan Perdagangan	Ada/tidak
15.	Kawasan Kumuh	Ada/tidak
16.	Kawasan Jasa Hiburan	Ada/tidak
17.	Kawasan Wisata	Ada/tidak
18.	Kawasan Bantaran Sungai	Ada/tidak
19.	Kawasan Longsor	Ada/tidak
20.	Kawasan.....	Ada/tidak
21.	Kawasan.....	Ada/tidak

4. Jarak Ke Pusat Pemerintahan

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	2	3	
1.	Ke pemerintahan Kecamatan	Km
2.	Ke pemerintahan kota	Km
3.	Ke Pemerintah Provinsi	Km

B. Data Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1.	0-12 Orang Orang
2.	> 1 - < 5 Tahun Orang Orang
3.	≥ 5 - < 7 Tahun Orang Orang
4.	≥ 7 - ≤ 15 Tahun Orang Orang
5.	> 15 - 56 Tahun Orang Orang
6.	> 56 Tahun Orang Orang

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

No.	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1.	Jumlah Penduduk Orang Orang
2.	Jumlah Laki-Laki Orang Orang
3.	Jumlah Perempuan Orang Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga KK KK

C. DATA TINGKAT PERKEMBANGAN

1. Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf orangorang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat orangorang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat orangorang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat orangorang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat orangorang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1 orangorang
		7. Jumlah Penduduk tamat D-2 orangorang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3 orangorang
2.	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah Penduduk tamat D-3 orang	... orang
		2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	... orang	... orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	... orang	... orang
3.	Prasarana Pendidikan	1. Jumlah SLTA/Sederajat buahbuah
		2. Jumlah SLTP/Sederajat buahbuah
		3. Jumlah SD/Sederajat buahbuah
		4. Lembaga Pendidikan agama buahbuah
		5. Lembaga pendidikan lain (Kursus/sejenisnya) buahbuah

2. Kesehatan Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Kematian bayi	1. jumlah bayi lahirorang orang
		2. jumlah bayi matiorang orang
2.	Gizi dan Kematian Balita	1. Jumlah balita orang orang
		2. Jumlah balita gizi buruk orang orang
		3. Jumlah balita gizi baik orang orang
		4. Jumlah balita mati orang orang
3.	Cakupan Imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio orang orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1 orang orang
		3. Cakupan imunisasi BCG orang orang
4.	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup
5.	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup	1. Total rumah tangga dapat akses air bersihRTRT
		2. Pengguna air sumur pompaRTRT
		3. Pengguna sumur galiRTRT
		4. Pengguna mata airRTRT
		5. Pengguna hidran umumRTRT
		6. Pengguna penampung air hujanRTRT
		7. Pengguna embunRTRT
		8. Pengguna perpipaanRTRT
		9. lainnyaRTRT
		10. Total rumah tangga tidak mendapat air bersihRTRT
6.	Kepemilikan Jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban/ WCRTRT
		2. Total rumah tangga yg tidak mempunyai jamban/WCRTRT
		3. Pengguna MCKRTRT

3. Ekonomi Masyarakat

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pengangguran	1.jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun orang orang
		2.Jumlah penduduk usia 15-56 orang orang orang
		3.Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga orang orang
		4.Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja orang orang
2.	Pendapatan	Sumber Pendapatan		
		1. Pertanian	Rp.....	Rp.....
		2. Kehutanan	Rp.....	Rp.....
		3. Perkebunan	Rp.....	Rp.....
		4. Peternakan	Rp.....	Rp.....
		5. Perikanan	Rp.....	Rp.....
		6. Perdagangan	Rp.....	Rp.....
		7. Jasa	Rp.....	Rp.....
		8. Usaha Penginapan/ Hotel dan sejenisnya	Rp.....	Rp.....
		9. Pariwisata	Rp.....	Rp.....
10. Industri rumah tangga	Rp.....	Rp.....		
3.	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar	Ada/tidak	Ada/tidak
		2. Lembaga Koperasi/ sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
		3. BUMdes	Ada/tidak	Ada/tidak
		4. Toko/kios	Ada/tidak	Ada/tidak
		5. Warung makan	Ada/tidak	Ada/tidak
		6. Angkutan	Ada/tidak	Ada/tidak
		7. Pangkalan ojek, becak, delman atau sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
4.	Tingkat Kesejahteraan	1. Jumlah KeluargaKelKel
		2. Jumlah Keluarga PrasejahteraKelKel
		3. Jumlah keluarga sejahtera 1KelKel
		4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2KelKel
		5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3KelKel
		6. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plusKelKel

4. Keamanan dan Ketertiban

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Konflik Sara	1. Konflik antar kelompok	... kasus	... kasus
		2. Konflik antar etnis	... kasus	... kasus
		3. Konflik berbau agama	... kasus	... kasus
2.	Perkelahian	1. Kasus Perkelahian	... kasus	... kasus
		2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	... kasus	... kasus
		3. Kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah	... kasus	... kasus
3.	Pencurian dan Perampokan	1. Kasus pencurian/ perampokan	... kasus	... kasus
		2. Kasus pencurian/ perampokan dengan kekerasan	... kasus	... kasus
		3. Kasus Pencurian/ perampokkan dengan pelaku dari desa setempat	... kasus	... kasus
4.	Perjudian	Kasus Perjudian	... kasus	... kasus
5.	Narkoba	1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat	... kasus	... kasus
		2. Jumlah Kasus Penduduk yang menjadi korban narkoba	... kasus	... kasus
6.	Prostitusi	Kasus Protistusi		
7.	Pembunuhan	1. Jumlah kasus pembunuhan	... kasus	... kasus
		2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat	... kasus	... kasus
		3. Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat	... kasus	... kasus

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
8.	Kejahatan Seksual	1. Jumlah kasus perkosaan	... kasus	... kasus
		2. Jumlah kasus perkosaan pada anak	... kasus	... kasus
		3. Jumlah kasus kehamilan di luar nikah	... kasus	... kasus
9.	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Kekerasan terhadap isteri	... kasus	... kasus
		2. Kekerasan terhadap suami	... kasus	... kasus
		3. Kekerasan terhadap anak	... kasus	... kasus
		4. Kekerasan terhadap anggota keluarga lain	... kasus	... kasus
10.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan	... kasus	... kasus
11.	Partisipasi masyarakat dalam Keamanan Swakarsa	1. Jumlah Pos siskamling	... unit	... unit
		2. Jumlah anggota hansip	... orang	... orang
		3. Jumlah kelompok ronda	... Kel	... Kel

5. Partisipasi Masyarakat

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pemilihan Umum	1. Legislatif		
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	... orang	... orang
		2. Presiden/wakil Presiden	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	... orang	... orang
2.	Pemilihan Kepala Daerah	1. Gubernur/ Wakil Gubernur	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	... orang	... orang
		2. Walikota/Wakil Walikota	... orang	... orang
		• Jumlah penduduk memiliki hak pilih	... orang	... orang
		• Jumlah Penduduk menggunakan hak pilih	... orang	... orang

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
3.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	1. Jumlah penduduk yang ikut dalam Musrenbang	... orang	... orang
		2. Jumlah peserta Laki-laki	... orang	... orang
		3. Jumlah peserta perempuan	... orang	... orang
4	Kegotong-royongan Penduduk	1. Jumlah kegiatan Gotong royong dalam membangun rumah	... kali	... kali
		2. Jumlah kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	... kali	... kali
		3. Jumlah Kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	... kali	... kali
		4. Jumlah kegiatan gotong-royong membangun jalan/jembatan	... kali	... kali
		5. Jumlah kegiatan gotong royong membangun saluran irigasi	... kali	... kali
		6. Jumlah kegiatan gotong royong penanggulangan bencana	... kali	... kali
		7. Kegiatan gotong royong lainnya	... kali	... kali
		8. Kegiatan bulan bakti gotong royong	... kali	... kali

6. Pemerintahan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Kelurahan	1. Sarana Prasarana		
		• Gedung Kantor	Baik/rusak	Baik/rusak
		• Gedung Pertemuan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Perangkat Kelurahan	Lengkap/tidak	Lengkap/tidak
		• Mesin tik/komputer	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Kendaraan dinas lurah	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Struktur Organisasi	Ada/tidak	Ada/tidak
		2. Keuangan		
		• APBD Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Belanja Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Bantuan/Hibah Lainnya	Ada/tidak	Ada/tidak
		3. Akuntabilitas		
		• Kota Pengaduan Masyarakat	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Laporan Kinerja tahunan	Ada/tidak	Ada/tidak
• Laporan akhir jabatan Lurah	Ada/tidak	Ada/tidak		
• Papan informasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak		
• Loket Pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak		

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
		4. Administrasi		
		• Buku registrasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Buku Profil Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Administrasi Keuangan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Kartu uraian tugas	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Administrasi penduduk	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Administrasi Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Buku Registrasi umum	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Peta wilayah Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak

7. Lembaga Kemasyarakatan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEBERADAAN
1	2	3	4
1.	Organisasi Perempuan	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
2.	Organisasi Pemuda	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
3.	Organisasi Profesi	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
4.	Organisasi Bapak	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
5.	LPM	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
6.	Kelompok Gotong Royong	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
7.	Karang Taruna	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
8.	Lembaga Adat	Lembaga adat dalam pengelolaan hutan	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan laut/pantai	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam penyelesaian konflik warga	Ada/Tidak
		Lembaga Adat perkawinan	Ada/Tidak
		Lembaga adat lainnya	Ada/Tidak

8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Realisasi 10 Program Pokok PKK	1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	...keg	...keg
		2. Gotong Royong	...keg	...keg
		3. Pangan	...keg	...keg
		4. Sandang	...keg	...keg
		5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga	...keg	...keg
		6. Pendidikan dan keterampilan	...keg	...keg
		7. Kesehatan	...keg	...keg
		8. Pengemban Kehidupan Berkoperasi	...keg	...keg
		9. Pelestarian lingkungan Hidup	...keg	...keg
		10. Perencanaan sehat	...keg	...keg
2.	Organisasi PKK	Kelengkapan :		
		1. Kelompok Kerja	Ada/Tidak	Ada/Tidak
		2. Kelompok Dasa Wisma	Ada/Tidak	Ada/Tidak

II. Skor Penilaian Perlombaan Kelurahan

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
I. Pendidikan Masyarakat			5 - 100
1.	Presentase Penduduk Tamat SLTP	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
		> 8%	20
2.	Presentase Penduduk Buta Huruf	Bila menurun kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	6
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	18
		> 8%	20
3.	Realisasi Wajar 9 Tahun	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 6%	4
		> 6% - ≤ 8%	6
		> 8% - ≤ 10%	12
		> 10% - ≤ 12%	18
		> 12%	20
4.	Angka Putus Sekolah	Bila menurun kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8
		> 4% - ≤ 6%	16
		> 6%	20
5.	Sarana Pendidikan	Tidak ada peningkatan	1
		Ada Peningkatan	20

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
II Kesehatan Masyarakat			9 - 150
1.	Kematian Bayi	Bila menurun kurang dari 10%	1
		≥ 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	8
		> 20% - ≤ 25%	12
		> 25% - ≤ 30%	18
		> 30%	20
2.	Kematian Balita	Bila menurun kurang dari 10%	1
		≥ 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	8
		> 20% - ≤ 25%	12
		> 25% - ≤ 30%	18
		> 30%	20
3.	Gizi Balita	Bila Balita bergizi buruk menurun kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	4
		> 10% - ≤ 15%	8
		> 15% - ≤ 20%	12
		> 20% - ≤ 25%	18
		> 25%	20
4.	Cakupan Imunisasi Polio - 3	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	2
		> 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	6
		> 20% - ≤ 25%	8
		> 25%	10
	DPT - 1	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	2
		> 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	6
		> 20% - ≤ 25%	8
		> 25%	10
	BCG	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	2
		> 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	6
		> 20% - ≤ 25%	8
		> 25%	10

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
5.	Angka Harapan Hidup	Bila meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
6.	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
7.	Pemilikan Jamban	Bila Pemilikan Jamban Kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR		
III Ekonomi Masyarakat			4 - 40		
1.	Presentase Pengangguran	Bila menurun kurang dari 1%	1		
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2		
		$> 2\% - \leq 4\%$	4		
		$> 4\% - \leq 6\%$	6		
		$> 6\% - \leq 8\%$	8		
		$> 8\%$	10		
		2.	Pendapatan Perkapita	Bila meningkat kurang dari 1%	1
				$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
				$> 2\% - \leq 4\%$	4
				$> 4\% - \leq 6\%$	6
$> 6\% - \leq 8\%$	8				
$> 8\%$	10				
3.	Lembaga Ekonomi	Bila menurun	1		
		Bila tetap	5		
		Bila meningkat	10		
4.	Tingkat Kesejahteraan	Bila KK prasejahtera menurut kurang dari 1%	1		
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2		
		$> 2\% - \leq 4\%$	4		
		$> 4\% - \leq 6\%$	6		
		$> 6\% - \leq 8\%$	8		
		$> 8\%$	10		

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
IV Keamanan dan Ketertiban			11 - 55
1.	Konflik Sara	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
2.	Perkelahian	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
3.	Pencurian / Perampokkan	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
4.	Perjudian	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
5.	Kasus Narkoba	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
6.	Portitusi	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
7.	Pembunuhan	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
8.	Kejahatan Seksual	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
9.	Kekerasan dalam rumah tangga	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
10.	Penculikan	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5
11.	Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan	Bila meningkat	1
		Bila menurun/tidak ada	5

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
V. Partisipasi Masyarakat			43 - 65
1.	Pemilihan Umum	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
	Pemilihan Presiden	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
	Pemilihan Legislatif	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
2.	Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
3.	Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota	Bila < 75%	8
		Bila ≥ 75%	10
4.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Bila Partisipasi masyarakat menurun	1
		Bila partisipasi masyarakat meningkat	5
		Bila Partisipasi laki-laki menurun	1
		Bila Partisipasi laki-laki meningkat	5
5.	Gotong Royong	Bila kegiatan Gotong Royong Menurun	1
		Bila kegiatan gotong royong meningkat	5

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
VI Pemerintahan			5 - 60
	Pemerintah Kelurahan		
1.	Sarana Prasarana	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6 sarana	10
2.	Administrasi Kelurahan	Bila kurang dari 3-4 macam	1
		Bila ada 4-7 macam	5
		Bila ada 8-9 macam	10
3.	Keuangan Kelurahan	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila belanja pembangunan meningkat kurang dari 1 Tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
> 8%	10		
5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1 s.d 2	2
		Bila ada 3 s.d 5	5
		Bila semua ada	10

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
VII Lembaga Kemasyarakatan			0 - 45
1.	Organisi Perempuan	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
2.	Organisasi Pemuda	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
3.	Organisasi Profesi	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
4.	Organisasi Bapak	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
5.	LPM	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
6.	Kelompok Gotong Royong	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
7.	Karang Taruna	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
8.	Lembaga Adat	Bila tidak ada	0
		Bila hanya ada 1	2
		Bila hanya ada 2	4
		Bila ada 3 lembaga	6
		Bila ada 4 lembaga	8
		Bila ada ≥ 4 lembaga	10
VIII. Kesejahteraan Keluarga / PKK			1 - 25
1.	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 Kegiatan	1
		Terealisasi 3 - 4 kegiatan	5
		Terealisasi 5 - 6 kegiatan	10
		Terealisasi 7 - 8 kegiatan	15
		Terealisasi 9 - 10 kegiatan	20
2.	Kelengkapan Organisasi	Tidak ada	0
		Ada 1 Kelengkapan	3
		Ada 2 Kelengkapan	5

III. Indikator dan Skor Penilaian Perlombaan Kelurahan (Muatan Lokal/Tambahan)

A. Indikator Penilaian Perlombaan Kelurahan :

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
I	Ekspose Lurah	
1.	Penampilan	a. baik b. cukup c. kurang
2.	Metode penyampaian	a. sistematis b. kurang sistematis c. tidak sistematis
3.	Isi materi	a. baik b. cukup c. kurang
4.	Penguasaan materi	a. baik b. cukup c. kurang
5.	Inovatif/ kreativitas	Ada/tidak ada
II	Ekspose Ketua TP.PKK Kelurahan	
1.	Penampilan	a. baik b. cukup c. kurang
2.	Metode penyampaian	a. sistematis b. kurang sistematis c. tidak sistematis
3.	Isi materi	a. baik b. cukup c. kurang
4.	Penguasaan materi	a. baik b. cukup c. kurang
5.	Inovatif/ kreativitas	Ada/tidak ada

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
III	Ekspose Ketua LPM Kelurahan	
1.	Penampilan	a. baik b. cukup c. kurang
2.	Metode penyampaian	a. sistematis b. kurang sistematis c. tidak sistematis
3.	Isi materi	a. baik b. cukup c. kurang
4.	Penguasaan materi	a. baik b. cukup c. kurang
5.	Inovatif/ kreativitas	Ada/tidak ada

B. Skor Penilaian Perlombaan Kelurahan

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
I. Ekspose Lurah			6 - 30
1	Penampilan	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
2	Metoda penyampaian	a. sistematis	5
		b. kurang sistematis	3
		c. tidak sistematis	1
3	Isi materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
4	Penguasaan materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
5	Inovatif/ kreativitas	a. ada	5
		b. tidak ada	1

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
II. Ekspose Ketua TP. PKK Kelurahan			6 - 30
1	Penampilan	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
2	Metoda penyampaian	a. sistematis	5
		b. kurang sistematis	3
		c. tidak sistematis	1
3	Isi materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
4	Penguasaan materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
5	Inovatif/ kreativitas	a. ada	5
		b. tidak ada	1

No.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
III.	Ekspose Ketua LPM Kelurahan		6 - 30
1	Penampilan	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
2	Metoda penyampaian	a. sistematis	5
		b. kurang sistematis	3
		c. tidak sistematis	1
3	Isi materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
4	Penguasaan materi	a. baik	5
		b. cukup	3
		c. kurang	1
5	Inovatif/ kreativitas	a. ada	5
		b. tidak ada	1

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN KELURAHAN
 DI KOTA CIREBON

BERITA ACARA

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN

TINGKAT KECAMATAN/KOTA CIREBON

TAHUN

NOMOR:.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
 (...-...-....), kami Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kota
 Cirebon Tahun telah mengadakan Rapat Evaluasi Penilaian Lomba
 Kelurahan Tingkat Kecamatan/ Kota Cirebon dan menentukan hasilnya
 sebagai:

NO	KELURAHAN JUARA TINGKAT KECAMATAN/ KOTA	JUARA	SKORE
1	2	3	4
1			
2			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon,

TIM PENILAI :
TINGKAT KECAMATAN/ KOTA CIREBON

Mengetahui:

CAMAT/ SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
Selaku
Penanggung Jawab

NAMA
NIP.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 44 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERLOMBAAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON

**LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN KELURAHAN
DI KECAMATAN / KOTA.....
TAHUN**

I. PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Dasar
- C. Sistematika

II. SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN

- A. Sasaran Penilaian
- B. Sistem Penilaian
- C. Tertib Penilaian

III. PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- A. Pelaksanaan dan penilaian perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan kota.
- B. Hasil yang dicapai, meliputi:
Kelurahan juara pertama, jura-juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan dan kota, yang diuraikan dalam: nama kelurahan, hasil pembangunan yang menonjol dan skor perlombaan kelurahan

IV. POTENSI PENGEMBANGAN UNGGULAN

V. JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN

VI. PEMBIAYAAN

- A. Pemerintah Daerah
- B. Lain –lain

VII. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

- A. Permasalahan yang timbul
- B. Upaya Pemecahan

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

IX. PENUTUP

X. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan Camat/Walikota tentang Penetapan Kelurahan Juara Perlombaan Kelurahan di daerah masing-masing.
- B. Buku profil kelurahan juara-juara perlombaan kelurahan, riwayat hidup lurah.
- C. Lain-lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

